

Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango Tabir Lintas Merangin

Meri Aulia¹, Jamrizal², Lukman hakim³

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengeksplorasi tentang bagaimana implementasi kepala Madrasah meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan khususnya di Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan pada suatu latar atau individu yang diamati secara holistik atau utuh dengan rancangan deskriptif langsung dengan implementasi kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta mendeskripsikan secara jelas keadaan sesungguhnya di lapangan. Implementasi kebijakan kepala Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango sudah cukup baik. Beberapa langkah-langkah yang ada dalam implementasi kebijakan kepala madrasah sudah dapat dilaksanakan dengan baik, seperti Perencanaan Kepala Madrasah yang terukur, Kepala Madrasah telah mampu menjalankan peran sebagai pendidik, manajer, pemimpin, administrator, supervisor, inovator dan motivator dengan baik. Selain itu Peran aktif masyarakat juga telah tampak hal tersebut dapat dilihat dengan bantuan yang diberikan Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango baik materiil maupun non materiil. Juga peran serta guru yang secara bersama – sama terus meningkatkan kualitasnya dengan berbagai macam kegiatan. Strategi – Strategi Implementasi yang dibuat Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango, juga cukup efektif misalnya dalam meningkatkan pengembangan mutu siswa di Madrasah, Strategi peningkatan kualitas siswa dengan berlandaskan nilai-nilai agama.

Kata Kunci: : implementasi kebijakan, mutu Pendidikan, madrasah

A. Pendahuluan.

Pendidikan merupakan hal penting dalam hidup yang dapat menentukan nasib seseorang di masa depan. Selain untuk mewujudkan kepentingan manusia itu sendiri, pentingnya pendidikan juga memegang peranan penting dalam mewujudkan rencana pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. Melalui kualitas pendidikan yang baik dapat meningkatkan kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan memberikan pendidikan yang diperoleh di madrasah, masyarakat akan mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas

¹ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meriaulia150298@gmail.com

² UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, jamrizal@uinjambi.ac.id

³ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, lukmanhakim70.dr@gmail.com

hidupnya. Selain itu masyarakat akan mampu berkembang dan maju serta mampu bersaing di era yang semakin berkembang ini. Sebagai suatu sistem, pendidikan yang ada harus dikelola dengan tepat secara efektif serta efisien guna tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam pengelolaan pendidikan itu sendiri dibutuhkan manajer dengan kinerja terbaik untuk mencapai tujuannya yaitu memberikan lulusan terbaik yang diharapkan oleh masyarakat

Sejak menduduki kursi pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia, Nadiem Anwar Makariem mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Ia mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia yaitu: “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan fondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya, mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho yang mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka.⁴ Suatu proses kebijakan pendidikan bermuara pada bagian implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Formulasi kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti manakala formulasi itu tidak dilanjutkan dengan proses implementasi. Formulasi kebijakan, jika dilaksanakan maka akan memiliki nilai manfaat.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari perlunya mendapatkan perhatian yang khusus. Elemen-elemen yang ada di dalamnya

⁴ Kasful Anwar US and Kompri, *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017).

terdapat beberapa kekurangan yang butuh memperoleh perbaikan. Mulai dari legitimasi, formulasi, dan implementasinya terhadap masyarakat. Dari ketiga komponen di atas, formulasi merupakan tahap awal yang paling genting dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Kegagalan suatu program kebijakan biasanya dimulai dari pengelolaan formulasi kebijakan pendidikan yang tidak akurat

Kebijakan pendidikan merupakan unsur akan kebijakan publik yang tidak dapat terlepas dengan sendirinya tanpa adanya sebuah evaluasi. Evaluasi kebijakan pendidikan yang dijalankan dalam menilai keefektifan serta wujud pertanggungjawaban pada pelaksanaan pendidikan pada publik untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan guna mengukur tingkat perbedaan di antara harapan serta realita. Evaluasi kebijakan pendidikan supaya dapat jadi sarana dalam menghimpun serta mengelola informasi tentang program atau pelayanan pendidikan, untuk menetapkan saran untuk perbaikan yang dibutuhkan guna penerapan kebijakan pendidikan terselenggara efektif sesuai terhadap standar yang ditentukan.

Oleh karena itu Kebijakan pendidikan juga merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung dibuat oleh pihak tertentu guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara. Karena pendidikan adalah masalah yang sangat penting untuk menentukan pergantian peristiwa atau indikasi seseorang dan untuk keberadaan suatu Negara. Ketika suatu kebijakan tidak berjalan dengan baik maka timbul suatu kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian di Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango bahwa yang mana sebagai lembaga pendidikan yang bertaraf Islami dengan kepemimpinan yang dijalankan oleh Salman Arsyad, SQ dapat dikatakan sebagai lembaga pencetak mutu dan kualitas lulusan yang baik serta memiliki prestasi baik akademik dan non akademik. Semua kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bapak oleh Salman Arsyad, SQ menunjukkan bahwa beliau menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Farizal, dkk dengan penelitian "Implementasi Kebijakan Strategi

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” penerapan prinsip-prinsip mutu dalam pendidikan sudah tidak dapat dielakkan dan ditawarkan lagi oleh penyelenggara atau pengelola lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Sebab penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di lembaga pendidikan sudah menjadi tuntutan mutlak dari seluruh lapisan masyarakat, baik siswa, orang tua, masyarakat, pendidikan lanjut, pemerintah dan dunia usaha. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan seorang kepala sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para guru atau bawahannya. Hal tersebut lah yang dapat membantu meningkatkan kualitas baik peserta didik maupun segala yang berkaitan dengan pendidikan di lembaga tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan pada suatu latar atau individu yang diamati secara holistik atau utuh dengan rancangan deskriptif.⁵ Metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian dengan fokus penelitian. Penelitian ini termasuk jenis studi kasus dalam penelitian ini yaitu meneliti objek yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta mendeskripsikan secara jelas keadaan sesungguhnya di lapangan. Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data, peneliti melakukan display data atau pemaparan data yang telah didapatkan peneliti di lapangan, selanjutnya data tersebut direduksi, dirangkum, dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah itu adalah verifikasi data dengan membuat kesimpulan yang didapat berdasarkan data yang telah direduksi. Pengecekan keabsahan data dari penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan metode.⁶

Untuk mempermudah dalam penelitian perlu ditentukan arah dan pembatasan terhadap daerah-daerah dan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadi kesimpangsiuran sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini dilaksanakan Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango Kecamatan Tabir

⁵ Nur Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014).

⁶ A Azizah and AY Sobri, “Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2016).

Lintas Merangin Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Subyek atau sumber utama dalam penelitian ini adalah Kepala. Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Penentuan informan yang menjadi sumber data dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu atau criterion based selection. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Wakil kepala, Tata Usaha, Guru, Karyawan Madrasah yang dapat memberikan informasi tentang Implementasi kebijakan Kepala Madrasah.

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data penting artinya dalam suatu penelitian, Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode kualitatif partisipatif (fieldwork relation). Di sinilah diperlukan kehadiran peneliti untuk tahu langsung kondisi dan fenomena di lapangan, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.⁷ Pada tahap ini, peneliti menggunakan tiga macam metode atau teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi dimaksudkan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sesuai berdasarkan laporan verbal di mana pada wawancara ini terdapat dialog yang dilakukan oleh interviewer (pewawancara) untuk memperoleh informasi dari interview (orang yang diwawancarai)⁸. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara untuk mendapat informasi dari Wakil kepala, Tata Usaha, Guru, Karyawan Madrasah, Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan-catatan, transkrip, buku, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.⁹ Pemeriksaan Keabsahan Data Keabsahan data adalah usaha meningkatkan derajat kepercayaan data apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Untuk meningkatkan derajat keabsahan data agar dapat dipertanggung jawabkan secara optimal maka perlu ada uji keabsahan data. Uji keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang

⁷ Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi," *Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung (2002).

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2013).

⁹ Ibid.

partisipasi, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kajian kasus negative dan pengecekan anggota.¹⁰ Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.¹¹ Untuk itu peneliti perlu melakukan; (1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, (2) mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan (3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango Tabir Lintas Merangin

Menurut Nanang Fatah, terdapat 3 (tiga) elemen kebijakan yaitu: (1) Pelaku kebijakan. (2) Lingkungan kebijakan. (3) Kebijakan publik. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih dan para analisis kebijakan sendiri. Lingkungan kebijakan, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar para pelaku kebijakan¹².

Linberry menyatakan bahwa implementasi mencakup komponen berikut: (1) Menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru. (2) Menerjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan. (3) Melakukan koordinasi terhadap sumber daya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggung jawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen. (4) Mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh dampak kebijakan.

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2008).

¹¹ Ibid.

¹² Fatah Nanang, "Analisis Kebijakan," *Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya* (2013).

2. Bagaimana Langkah-langkah kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango Tabir Lintas Merangin

Pada prinsipnya ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Menurut Hasbullah,¹³ pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan, setidaknya terdapat 4 (empat) pendekatan yaitu: (a) Pendekatan Struktural. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down*. Pendekatan ini memandang bahwa setiap kebijakan, termasuk pula kebijakan pendidikan, harus dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Pendekatan ini bersifat hirarkis-organik, sehingga relevan untuk situasi-situasi implementasi di mana di dalamnya diperlukan organisasi pelaksana yang bertingkat dengan pola perubahan kebijakan yang tinggi. (b) Pendekatan Prosedural dan Manajerial. Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada pendekatan struktural. Pendekatan ini berupaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan baik prosedur manajerialnya maupun teknik manajemennya. (c) Pendekatan Perilaku. Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana bukan pada organisasinya sebagaimana dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung baik. (d) Pendekatan Politik. Pendekatan ini lebih melihat

¹³ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Pendekatan politik selalu mempertimbangkan atas pemantauan kelompok pengikut dan kelompok penentang beserta dinamikanya. Dalam pendekatan ini, memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan.

3. Bagaimana implementasi kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango Tabir Lintas Merangin

Pengembangan kebijakan secara umum mengikuti model yang bermacam-macam. Ada dua metode pengembangan kebijakan; (1) *Model Synotic* Satu otoritas perencanaan pusat tunggal untuk keseluruhan masyarakat, yang mengabungkan kontrol ekonomi, politik, dan sosial kedalam satu proses perencanaan terpadu sehingga tidak diperlukan adanya intreraksi berbagai pihak. (2) *Model Incremental* Interaksi bersifat sangat penting dan tidak mengandalkan analisis menyeluruh pada suatu persoalan untuk membentuk sebuah patokan penyelesaian masalah(Abd Majid. 2018: 82 Adapun pendekatan yang secara luas digunakan untuk implementasi kebijakan dan perubahannya meliputi pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Teori *top-down* memandang perancang kebijakan sebagai actor sentral dan memusatkan perhatian mereka pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi ditingkat pusat.

Implementasi merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan yang dilakukan, termasuk dalam hal ini kebijakan dalam bidang pendidikan. Implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, merupakan proses yang bersangkutan paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran. Proses implementasi bersangkutan paut pula dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui, strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini semata demi mewujudkan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Demikian pula

halnya kebijakan yang dilakukan pada Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin.

D. Kesimpulan.

Implementasi kebijakan kepala Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango sudah cukup baik. Beberapa langkah-langkah yang ada dalam implementasi kebijakan kepala madrasah sudah dapat dilaksanakan dengan baik, seperti Perencanaan Kepala Madrasah yang terukur, Kepala Madrasah telah mampu menjalankan peran sebagai pendidik, manajer, pemimpin, administrator, supervisor, inovator dan motivator dengan baik. Selain itu Peran aktif masyarakat juga telah tampak hal tersebut dapat dilihat dengan bantuan yang diberikan Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango baik materiil maupun non materiil. Juga peran serta guru yang secara bersama – sama terus meningkatkan kualitasnya dengan berbagai macam kegiatan. Strategi – Strategi Implementasi yang dibuat Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah Mensango, juga cukup efektif misalnya dalam meningkatkan pengembangan mutu siswa di Madrasah, Strategi peningkatan kualitas siswa dengan berlandaskan nilai-nilai agama.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2013.
- Azizah, A, and AY Sobri. “Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2016).
- Danim, Sudarwan. “Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi.” *Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung (2002).
- Hasbullah, H.M. *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nanang, Fatah. “Analisis Kebijakan.” *Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (2013).

Ulfatin, Nur. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2014.

US, Kasful Anwar and Kompri. *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.